

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Masyarakat Suku Papua

Papua merupakan sebuah Provinsi yang ada di ujung Indonesia, yaitu Merauke, walaupun Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tetapi dalam kenyataannya terlalu banyak konflik yang terjadi di Papua, dari masa lalu, sejarah Papua, hingga saat ini selalu saja ada konflik yang terjadi di wilayah mereka.

1. Sejarah Papua

Papua adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tengah pulau Papua atau bagian paling Timur *West New Guinea* (Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau *East New Guinea*. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua Barat terutama oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), para Nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (*Nederlands New Guinea* atau *Dutch New Guinea*). Setelah berada dibawah penguasaan Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas *Freeport*, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.

Dibawah Orde Baru, asal-usul nama Irian itu dipalsukan, yaitu dinyatakan bahwa itu adalah akronim untuk "*Ikut Republik Indonesia Anti Nederland*". Kita semua tidak mengerti apa motif sebenarnya, tapi yang jelas menjadi senjata yang

makan tuan, mantan Presiden B.J.Habibie turut dibohongi sehingga mengira Irian itu hanya nama bagian Barat pulau itu, yaitu bagian yang pernah dijajah Belanda (*Nederland*), akibat politik penerangan Orde Baru yang tidak beres, masyarakat luas di Indonesia termasuk yang di Irian Barat sendiri, sampai-sampai tokoh-tokoh gerakan reformasi sendiripun turut menjadi korban. Dalam kenyataan, Irian merupakan dari bahasa Biak, yaitu nama yang dipakai dalam mitologi dan folklore tradisional Biak untuk menyebut daratan besar yang oleh orang Eropa dinamakan "Guinea Baru" (Droglever, 2006 : 63)

Pada awalnya gagasan untuk melakukan pemekaran provinsi Irian Jaya adalah pada seminar Dies Natalis Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) ke 16 di Jakarta pada 3 Mei 1983. Dalam seminar tersebut tercetus perlunya diadakan pemekaran terhadap provinsi Irian Jaya yaitu akan dipecah menjadi tiga wilayah dan pembentukan kabupaten-kabupaten, namun ada dua pendapat yang berbeda dalam hal tersebut, yaitu pemekaran dilakukan dari bawah untuk pembentukan kabupaten-kabupaten terlebih dahulu, tetapi di sisi lainnya terdapat pendapat bahwa pembentukan pemekaran diawali dari atas yaitu membentuk pemekaran provinsi. Sehubungan dengan polemik yang ada tersebut, Gubernur Irian Jaya pada saat itu yaitu Busyri memanggil orang-orang Irian Jaya yang berpolemik tersebut, yaitu JRG Jopari, tiga mahasiswa IIP asal Irian jaya (Michael Manufandu, Obednego Rumkorem, Martinus Howay), dan beberapa anggota DPR yang mewakili Irian Jaya yaitu ada MC DaLopez, Izaak Hindom dan Mochamad Wasaraka. Mereka dipanggil Gubernur dalam rangka membahas adanya polemik pemekaran tersebut.

Tetapi pada kenyataannya gagasan pemekaran tersebut tidak berjalan sebagaimana semestinya sampai akhirnya Presiden Soeharto jatuh. Hal yang menarik adalah ketika masa Presiden Soeharto menjabat, Irian Jaya sangat ketat dengan diberlakukannya Daerah Operasional Militer (DOM), dan dampak dari DOM tersebut membuat rakyat Irian Jaya semakin sengsara.

Ketika terjadi pergantian Presiden Republik Indonesia dari Soeharto kepada B.J. Habibie, gagasan untuk pemekaran itu kembali muncul. Kali ini adalah Gubernur Irian Jaya yang baru Freddy Numberilah sosok yang dapat dikatakan memaksakan untuk tetap dimekarkannya Irian Jaya demi perubahan rakyat Irian Jaya menjadi lebih baik setelah masa-masa yang membuat mereka sengsara dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan DOM yang diterapkannya. Kemudian hal ini disambut gembira oleh seluruh rakyat Irian Jaya pada saat itu, mereka beranggapan dengan diadakannya pemekaran dan pergantian Presiden yang terjadi tidak akan ada lagi tekanan terhadap mereka.

Harapan mereka muncul ketika adanya RUU tentang pemekaran Irian Jaya dan Kabupaten-kabupaten yang ada. Harapan tentang adanya perubahan itu akhirnya terwujud setelah disahkannya UU No.45 Tahun 1999 tentang pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Adanya UU No. 45 tahun 1999 ini berarti Irian Jaya terbagi menjadi tiga Provinsi, Irian Jaya Barat dengan Ibu Kota Manokwari, Irian Jaya Tengah dengan Ibu Kota Timika, dan Irian Jaya Timur dengan Ibu Kota Jayapura (Elisabeth, 2006 : 27-31).

Adriana Elisabeth dalam Jurnalnya Papua Menggugat (2006) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membuat mengapa UU No.45 tahun 1999 ini disahkan yang ada pada poin menimbang pada UU No. 45 tahun 1999 yaitu :

- a. Bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Irian Jaya,... serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan pembangunan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksut pada masa mendatang;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan peningkatan beban tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Irian Jaya... dipandang perlu membentuk Provinsi Irian Jaya Tengah dan Barat sebagai pemekaran dari Irian Jaya;
- c. Bahwa pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat,... akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian lebih jauh lagi dijelaskan pada isi Undang-Undang No. 45 tahun 1999. Kemudian hal-hal tersebut selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya tanggal 10 Juli 1999, Nomor 10/DPRD/1999 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Irian Jaya (Elisabeth, 2006 : 28).

Sejak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 menyatakan Papua ingin bergabung dengan Indonesia, krisis terus membekap wilayah diujung Timur negara ini. Situasi keamanan fluktuatif. Milisi Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus melancarkan gerilya. Mereka membunuh tentara, polisi, dan bahkan

warga asing di sana. Kehadiran pasukan keamanan di Papua tidak mampu menjamin sepenuhnya keamanan di Bumi Cendrawasih. Bukan sekadar perlawanan bersenjata, kaum-kaum intelektual Papua terus bergerilya di luar negeri, termasuk Jacob Rumbiak. Dalam kongres ketiga di Jayapura Papua, Oktober 2011, menghasilkan terbentuknya negara Federasi Papua Barat, dia diangkat sebagai menteri luar negeri.

Gambar.2.1



Sosok Jacob Rumbiak yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Papua Barat

(Sumber : <http://www.komunitas-papua.net>)

Selama lima dekade terakhir, dukungan untuk merdeka kian menyebar, ketidaksukaan terhadap pemerintah Indonesia makin hari makin menyebar, orang Papua kehilangan tanah-tanah adat bagi proyek-proyek pembangunan, dan gelombang para pendatang dari daerah-daerah diseluruh Indonesia meningkat. Dukungan itu dalam bentuk gerakan gerilya bersenjata, Organisasi Papua Merdeka, maupun serangkaian inisiatif non-kekerasan. Taktik umum yang dipakai para pendukung kemerdekaan secara damai adalah menaikkan bendera Bintang

Kejora dalam upacara terbuka, terutama sekali pada peringatan 1 Desember.

Pada Oktober 2011, menghasilkan terbentuknya negara Federasi Papua Barat, dia diangkat sebagai menteri luar negeri. Keinginan mereka untuk merdeka dan lepas dari Indonesia sangat besar, setelah pergantian Presiden dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Jokowi, secara khusus Jacob Rumbiak mengungkapkan keinginannya :

“Sebenarnya saya yakin Pak Jokowi adalah orang baik, putra terbaik. Karena dia punya rencana sungguh mulia. Dia akan angkat keadilan, dia ingin memperbaiki kesalahan sejarah. Karena bangsa besar, bangsa betul-betul meletakkan nilai-nilai bangsanya dalam sejarah benar. Sebenarnya Papua itu bagian dari taktik Amerika untuk meruntuhkan Soekarno. Sehingga saya pikir sudah saatnya untuk Indonesia dan Papua, kita membangun masa depan. Indonesia dan Papua sebenarnya sama-sama korban dari perang global atau kebijakan dunia. Itu sebabnya jangan kita terus saling memusuhi. Kita bukan musuh, kita merupakan kedua pihak korban dari perang dingin. Kita perlu ambil kebijakan masa depan untuk kedua pihak, Indonesia dan Papua. Saya pikir rakyat Papua bicarakan lebih dekat dengan Indonesia. Kami tidak bisa lari jauh. Indonesia punya peran penting dimana kami harus akui. Ada kemajuan-kemajuan besar kami miliki dari Indonesia dan itu orang Papua akui. Tapi kami juga menghendaki pemerintah Indonesia menghargai dan mengakui hak kedaulatan kami, hak-hak politik kami” (<http://www.komunitas-papua.net/index.php/pesakitan-politik-di-papua/90-opini-komunitas-papua/206-cepat-atau-lambat-papua-pasti-merdeka>, diakses pada 11 November 2014, Jam 17.30).

Dari apa yang diungkapkan Jacob Rumbiak diatas, terlihat bahwa mereka sebenarnya percaya dengan pemerintahan Jokowi yang baru ini, tetapi mereka menginginkan hal yang lebih, yaitu kebebasan berpolitik, dan dari apa yang ada terlihat jelas untuk mendapatkan hak-hak diatas mereka merasa harus segera memerdekakan Papua Barat.

Kemudian masih banyak timbul pertanyaan dari masyarakat pada umumnya mengapa rakyat Papua melawan pemerintah Indonesia, bahkan mereka berjuang melalui organisasi perlawanan yang dibentuk oleh Gereja Khatolik yang ada di Papua, dan didapati jawaban bahwa ketika rezim Soeharto masih berjaya dan DOM begitu ketat diberlakukan di Irian Jaya, sehingga segala bentuk sikap kritis terhadap masalah-masalah pembangunan di Papua selalu dengan gampang dicap dengan stigma OPM. Suatu stigma yang nyaris sama seperti hukuman mati bagi setiap orang yang dikenai stigma tersebut. Oleh sebab itu, baik masyarakat maupun gereja mengalami kesulitan antara memberitakan kebenaran dengan menghadapi ancaman militer. Gereja begitu kesulitan untuk melakukan peran kenabian dan hanya bisa melakukannya melalui khotbah-khotbah di mimbar. Kecaman-kecaman terhadap kebijakan militer dan pembangunan cenderung dilakukan secara tertutup, melalui komunikasi antarpribadi ataupun melalui khotbah-khotbah.

Pada pertengahan tahun 1995, gereja melakukan suatu gebrakan berani dengan tampilnya Uskup Munninghoff, OPM melaporkan terjadinya pelanggaran HAM berkaitan dengan protes masyarakat Amung-me atas kehadiran dan perilaku menejemen PT Freeport. Laporan yang menyentak dunia internasional itu, makin memberanikan pimpinan-pimpinan gereja untuk meningkatkan peran dalam melaporkan berbagai bentuk ketidakadilan. Baik menyangkut kasus Mapduma, Bela, Jila dan Alama (1998) maupun kasus-kasus lain yang berlangsung berikutnya. Baik kasus Biak Berdarah (1998), kasus Sorong,

Merauke, Timika, Nabire dan sebagainya. Baik oleh Gereja Katholik, GKI di Irian Jaya, maupun GKII (Giay, 2010 : 3-4).

Study ELSHAM (Lembaga Study dan Hak Asasi Manusia) Papua Barat menunjukkan bahwa ada tiga permasalahan utama yang diungkapkan oleh Gaffar Afan dalam bukunya *Politik Indonesia - Transisi Menuju Demokrasi* :

Pertama, rakyat Papua menganggap bahwa *Act of Free Choice* 1969 yang dirubah di Indonesia menjadi musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai realisasi dari *New York Agreement* 1962 merupakan bentuk konkrit pengabaian dunia internasional dan pemerintah Indonesia atas hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri. Proses penyusunan *New York Agreement* sama sekali tidak melibatkan orang Papua. PEPERA dijalankan di bawah proses penuh intimidasi, larangan berkumpul dan berbicara, penghilangan orang, pembunuhan dan berbagai bentuk tindakan militer yang menistai demokrasi. Seluruh aktivitas yang menjauhkan orang Papua dari realisasi haknya untuk menentukan nasib sendiri dalam pandangan orang Papua jelas-jelas melanggar ketentuan Resolusi PBB No. 1 514 dan 1 541 tentang proses dekolonisasi bagi Bangsa-bangsa yang dijajah.

Kedua, atas dasar status legal yang diberikan oleh PBB melalui Resolusi No. 2504/XXIV tahun 1969 yang mengesahkan hasil PEPERA maka secara de jure Irian Jaya menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Keberadaan Indonesia di Papua dilalui dengan penetapan Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) untuk menunjang kebijakan pembangunan yang bertumpu pada strategi pertumbuhan ekonomi melalui pertambangan, HPH, transmigrasi, pariwisata dan berbagai proyek pembangunan lainnya. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada strategi pertumbuhan ekonomi itu berimplikasi pada aspek sosial budaya seperti perusakan lingkungan hidup, pengambilan tanah, penebangan hutan, perusakan dusun-dusun masyarakat, serta degradasi kebudayaan masyarakat setempat.

Ketiga, gabungan kedua permasalahan di atas menciptakan krisis identitas bagi orang Papua. Krisis identitas nampak dalam aspek kebudayaan, ekonomi, birokrasi pemerintahan, dan sebagainya. Maka muncul tuntutan untuk menghormati kebudayaan, pengembangan kebudayaan Papua Melanesia, Papunisasi birokrasi, penguasaan sumber daya ekonomi, maupun tuntutan agar pemerintah mengakui keberadaan lembaga adat.

Dari apa yang telah diketahui diatas, sebenarnya alasan untuk melawan Indonesia cukup jelas, mereka ingin mendapatkan hak mereka, terlalu sering terjadi kasus-kasus pembunuhan yang melanggar HAM seperti apa yang diungkapkan Benny Giay dalam jurnal *Runder Tisch zu West Papua*, bahwa “pelanggaran hak yang terjadi pada masyarakat Papua sudah melebihi batas yang tidak wajar dalam kehidupan manusia, sehingga perlu dilakukan perlawanan demi menegakkan hak azazi manusia dan kebebasan agar mendapatkan kehidupan yang damai dan selayaknya” (Giay, 2000 : 7).

Pada dasarnya semua yang terjadi pada rezim kepemimpinan Soeharto termasuk dengan yang dilakukan OPM bentukan mantan Presiden Soeharto terhadap rakyat Papua sudah tercium oleh berbagai media yang ada di Indonesia. Namun pada kenyataannya pers dan media pada saat itu tidak dapat melakukan apa-apa. Dalam pembahasan tentang pers, terdapat tiga dilema yang meliputi dunia pers, yakni definisi pers Pancasila, mekanisme perizinan dalam industri pers, dan dilema sensor dalam pers. Tak pernah ada rumusan jelas tentang pers Pancasila, yang sejak Orde Baru istilahnya dipasarkan. Tentang pers Pancasila, para pejabat hanya menyebut bahwa pers jenis ini bukan pers Liberal, juga bukan pers Komunis. Maksudnya, ini mengacu pada tipologi kuno yang dilansir Fred Siebert dan kawan-kawan dengan empat teori pers. Pers Pancasila lalu dibayangkan sebagai pers bertanggung jawab secara sosial.

Dalam praktik yang dijalankan muncul semacam panduan: mana yang boleh dan tidak boleh ditulis. Masalah antarsuku, agama, ras, dan antargolongan

tabu untuk ditulis. Masalah bisnis keluarga Soeharto, tidak boleh ditulis. Masalah gunting pita di mana-mana, boleh untuk ditulis. Pesawat militer jatuh, tidak boleh ditulis pada keesokan hari. Harus menunggu rilis resmi dari pihak markas besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Peristiwa kerusuhan baru bisa ditulis setelah ada pengumuman resmi, berikut jumlah korban dari pemerintah. Selain dari itu tidak boleh ditulis (Nazaruddin, 1974 : 24)

Soal perizinan dalam pers juga merupakan kesalahan berpikir yang mendasar. Namun ini bisa dipahami sebagai bagian dari usaha menundukkan pers di masa Orde Baru. Undang-Undang Pers pertama tahun 1966 jelas menyebutkan: untuk mendirikan surat kabar tidak perlu surat izin terbit (SIT), tetapi dalam klausul peralihan, hal surat izin dimungkinkan. Lalu dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor, tetapi nyatanya sensor justru hadir sehari-hari (Gandhi, 1985 : 14).

Informasi yang menjadi salah satu kunci proses menuju *civil society* bukanlah hal yang istimewa atau mewah, jika tidak ada mekanisme atau instrumen yang dijadikan suatu *justifikasi* oleh pemerintah dalam menjerat lawan-lawan politiknya atau pihak-pihak yang dianggap membahayakan kekuasaan dari pihak yang sedang berkuasa, seperti yang terjadi selama rezim Orde Baru berkuasa. Kita melihat begitu hebatnya manajemen kontrol informasi yang dijalankan oleh rezim Orde Baru dalam membungkam semua pergerakan demi mempertahankan kekuasaan, jelas adanya fakta bahwa informasi dapat memberikan kontrol yang luar biasa besarnya dalam segala aspek (Kurniawan, 2004: 31).

Pers dalam masa orde baru seakan-akan kehilangan jati dirinya sebagai media yang bebas berpendapat dan menyampaikan informasi. Meskipun orde baru telah menjanjikan keterbukaan dan kebebasan diawal pemerintahannya, namun pada kenyataannya dunia pers malah terbelenggu dan mendapat tekanan dari segala aspek. Pers pun tidak mau hanya diam dan terus mengikuti permainan politik Orde baru, sehingga banyak media massa yang memberontak melalui tulisan-tulisan yang mengkritik pemerintah, bahkan banyak pula yang membeberkan keburukan pemerintah. Itulah sebabnya pada tahun 1994 banyak media yang dibredel, seperti Tempo, deTIK, dan Monitor. Namun majalah Tempo adalah satu-satunya yang berjuang dan terus melawan pemerintah orde baru melalui tulisan-tulisannya, sampai akhirnya dapat kembali terbit setelah jatuhnya Orde baru. Pemerintah memang memegang kendali dalam semua aspek pada saat itu, terutama dalam dunia pers.

2. Masyarakat Suku Papua

Mengacu pada perbedaan topografi dan adat istiadat, penduduk Papua dapat dibedakan menjadi tiga kelompok besar (Droglever, 2006 : 43) :

1. Penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan ciri-ciri umum rumah di atas tiang (rumah panggung) dengan mata pencaharian *menokok* sagu dan menangkap ikan.
2. Penduduk daerah pedalaman yang hidup di daerah sungai, rawa danau dan lembah serta kaki gunung. Umumnya mereka bermata pencaharian menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan.
3. Penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian berkebun dan berternak secara sederhana. Kelompok asli di Papua terdiri atas 193 suku dengan 193 bahasa yang masing-masing berbeda. *Tribal arts* yang indah dan telah terkenal di dunia dibuat oleh suku Asmat, Ka moro, Dani, dan

Sentani. Sumber berbagai kearifan lokal untuk kemanusiaan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik diantaranya dapat ditemukan di suku Aitinyo, Arfak, Asmat, Agast, Aya maru, Mandacan, Biak, Arni, Sentani, dan lain-lain.

Masyarakat berpenduduk asli Papua cenderung menggunakan bahasa daerah yang sangat dipengaruhi oleh alam, laut, hutan dan pegunungan. Dalam perilaku sosial terdapat suatu falsafah masyarakat yang sangat unik, misalnya seperti yang ditunjukkan oleh budaya suku Komoro di Kabupaten Mimika, yang membuat genderang dengan menggunakan darah. Suku Dani di Kabupaten Jayawijaya yang gemar melakukan perang perangan, yang dalam bahasa Dani disebut *Win*.

Budaya ini merupakan warisan turun-temurun dan di jadikan festival budaya lembah Baliem. Ada juga rumah tradisional Honai, yang di dalamnya terdapat mumi yang di awetkan dengan ramuan tradisional. Terdapat tiga mumi di Wamena, Mumi Aikima berusia 350 tahun, mumi Jiwika 300 tahun, dan mumi Pumo berusia 250 tahun. Kemudian pada suku Marin, Kabupaten Merauke, terdapat upacara Tanam Sasi, sejenis kayu yang dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian upacara kematian. Sasi ditanam 40 hari setelah hari kematian seseorang dan akan dicabut kembali setelah 1.000 hari. Budaya suku Asmat dengan ukiran dan souvenir dari Asmat terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran asmat mempunyai empat makna dan fungsi, masing-masing :

1. Melambangkan kehadiran roh nenek moyang;
2. Untuk menyatakan rasa sedih dan bahagia;
3. Sebagai suatu lambang kepercayaan dengan motif manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda lain;

4. Sebagai lambang keindahan dan gambaran ingatan kepada nenek moyang.

Keagamaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Papua dan dalam hal kerukunan antar umat beragama di sana dapat dijadikan contoh bagi daerah lain, mayoritas penduduknya beragama Kristen, namun demikian sejalan dengan semakin lancarnya transportasi dari dan menuju Papua, jumlah orang dengan agama lain termasuk Islam juga semakin berkembang.

Banyak misionaris yang melakukan misi keagamaan di pedalaman-pedalaman Papua. Mereka memainkan peran penting dalam membantu masyarakat, baik melalui sekolah misionaris, balai pengobatan, maupun pendidikan langsung dalam bidang pertanian, pengajaran bahasa Indonesia maupun pengetahuan praktis lainnya. Misionaris juga merupakan pelopor dalam membuka jalur penerbangan ke daerah-daerah pedalaman yang belum terjangkau oleh penerbangan reguler (<http://www.up4b.go.id>, diakses pada 9 juni 2014 jam-1930 WIB).

B. Suku Papua Sebagai Kelompok Minoritas

Papua merupakan sebuah provinsi yang cukup besar yang ada di Indonesia, tercatat pada tahun 2012 ada sekitar 5.703.998 penduduk yang ada baik di Papua maupun Papua Barat (<http://www.up4b.go.id>, diakses pada 9 juni 2014 jam-1930 WIB). Tetapi suku Papua yang sebanyak limajuta lebih itu akan berubah menjadi sangat minim bahkan dapat dikatakan sebagai kelompok minoritas jika mereka keluar dari wilayahnya. Salah satu kota yang menjadi

tujuan ataupun tempat untuk suku Papua di Indonesia adalah Yogyakarta, mengapa, karena Yogyakarta sebagai kota pendidikan, dan pemuda-pemudi asal Papua ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk mereka, maka dari itu mereka memilih Yogyakarta sebagai kota untuk mendapatkan pendidikan terbaik.

Sejak kedatangan suku Papua ke Yogyakarta, mereka telah menjadi kelompok minoritas, jika menggunakan satu pengertian minoritas yang saat ini orang ketahui secara umum, yaitu lebih kepada numerik ataupun jumlahnya, seperti yang diungkapkan Capotarti dan Deschennes dalam (Budiman 2007 : 10), bahwa minoritas ditunjukkan oleh numeriknya dengan sisa populasi yang lebih besar, dapat diartikan bahwa sebuah kelompok dapat diartikan sebagai kelompok minoritas jika jumlahnya lebih kecil dari sisa populasi yang ada dalam suatu tempat. Capotarti dan Deschennes menambahkan bahwa sebenarnya apa yang dimaksud dengan minoritas tidak hanya dilihat dari sebuah hitung-hitungan angka atau numeriknya saja (Capotarti dan Deschennes dalam Budiman, 2007 : 10).

Sangat menyedihkan melihat suku Papua di Yogyakarta yang memang berniat untuk menempuh pendidikan dengan baik tetapi karena adanya prasangka yang buruk dari warga lokal, sebenarnya bukan hanya prasangka, karna dari faktanya memang ada beberapa orang suku Papua yang memang benar-benar menjadi biang keributan di Yogyakarta ini, tentu masyarakat lokal tepatnya suku Jawa pasti beralasan dalam membuat *judgment* tentang suku Papua ini, misalnya dari media, ataupun yang mereka lihat langsung, tetapi tentu tidak semua masyarakat dari suku Papua yang ada di Yogyakarta berkelakuan seperti itu.

Seperti yang diungkapkan Antonovsky bahwa ada dua macam hal yang membuat kelompok minoritas sulit berkembang diantara kelompok mayoritas dan sebagai *biang* penyebab konflik, yaitu prasangka dan diskriminasi, selain prasangka yang buruk, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas, di sini terhadap suku Papua, justru membuat konflik besar, beberapa orang dari suku Papua yang tidak terima akan prasangka dan diskriminasi itu seperti melakukan pemberontakan, dan akhirnya terjadilah konflik antar suku yang ada di Yogyakarta. Kemudian terjadilah stereotip dari suku Jawa terhadap suku Papua bahwa suku Papua terkenal dengan orang-orang yang *rese*, suka bikin onar, dan hal negatif lainnya. Mungkin memang benar akan adanya stereotip seperti itu, tetapi kembali lagi bahwa tidak akan terjadi sebuah pemberontakan untuk membela kelompoknya tanpa diawali dengan prasangka dan diskriminasi (Antonovsky, 1960 : 81 dalam Simpson dan Yinger 1993 : 13).

Hal-hal negatif yang dilakukan beberapa oknum mahasiswa suku Papua di Yogyakarta seperti contohnya kriminalitas yang mereka lakukan tentunya telah menjadi suatu pandangan buruk masyarakat lokal terhadap suku Papua, hal ini tentu sangat merugikan bagi sebagian besar suku Papua di Yogyakarta yang datang untuk benar-benar menempuh pendidikan dan menambah wawasan pengetahuan mereka dari pendidikan itu sendiri. Akan ada stereotip yang melekat pada diri penduduk lokal terhadap suku Papua bahwa suku Papua sendiri memang seperti itu, walaupun pada dasarnya belum terdapat bukti nyata bahwa seluruh pendatang dari Papua di Yogyakarta seperti itu adanya. Pastinya hal ini membuat sangat tidak nyaman bagi masyarakat pendatang asal Papua, karena memang

belum tentu mereka semua melakukan hal yang sama dengan apa yang masyarakat lokal ketahui pada umumnya.

Media juga sangat berperan dalam pembentukan stereotip penduduk lokal terhadap suku Papua, misalnya dari pemberitaan di bawah ini :

“Kepolisian Sektor Depok Barat, Komisaris Wachyu Tri Budi Sulistiyono mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah menangkap biang kasus kerusuhan yang terjadi di Babarsari. Polisi sebenarnya mengejar kasus perampokan dan penyekapan. Tetapi ternyata pelaku itu merupakan salah seorang yang sering terlibat keributan, pertengkaran, dan tindak kekerasan disertai pembacokan. Komisaris Wachyu Tri Budi Sulistiyono menambahkan bahwa sang pelaku adalah warga Nusa Tenggara Timur dan warga Papua yang sedang menempuh pendidikan disalah satu universitas swasta di DIY”

(<http://www.tempo.co/read/news/2012/12/13/058447985/Polisi-Tangkap-Penggerak-Kerusuhan-Babarsari>, diakses pada tanggal 13 Juni 2014).

Pada 7 Mei 2013 Polres Sleman, Yogyakarta, menetapkan dua tersangka penganiayaan dua anggota TNI yang diduga dianiaya oleh beberapa warga ataupun mahasiswa asal Papua yang tinggal di Yogyakarta.

“Kepala Kepolisian Resor Sleman, Ajun Komisaris Besar Hery Sutrisman mengungkapkan Kedua tersangka adalah Kristian Balla Tagihuma, 25 tahun dan Frans Adi, 22 tahun. Dua orang lainnya yang sempat ditahan: Bobi Soa, 22 tahun dan Stenly Pekey, 23 tahun, dibebaskan kemarin siang. Dua lainnya memang berada di lokasi, tapi tidak melakukan apa-apa, Selasa 7 Mei 2013. Kristian dan Frans diduga menganiaya dua anggota Batalyon Infanteri 403/Wirasada Pratista yang bermarkas di Jalan Kaliurang Kilometer 6, Sleman, Minggu 5 Mei 2013. Beberapa tahun lalu, asrama mahasiswa Papua itu berada di dalam komplek Taman Kencana. Karena mereka sering menimbulkan keributan, warga komplek meminta mereka pindah. “Jika mabuk, sering sekali terjadi keributan,” ujar Eko. Menurut dia, mahasiswa Papua mudah emosional. “Sering terlihat warga Papua dari asrama itu yang keluar membawa tombak dan panah. Warga sempat khawatir,” katanya. Tapi sudah beberapa waktu tak ada lagi keributan. Benny Dimara, sesepuh warga Papua di Yogyakarta menjelaskan, ada 19 paguyuban warga Papua di Yogyakarta. Mereka tinggal di 16 asrama. Pengurus paguyuban bertugas mengawasi mereka. “Kami mengajak mahasiswa Papua berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat. Juga kadang ronda malam,” kata dia. Ada sekitar 6.000

mahasiswa asal Papua yang kuliah di Yogyakarta. Tiap Ahad digelar kebaktian di asrama maupun ikut kebaktian di gereja. "Mereka kami beri pengertian. Tugas mereka di sini kuliah dan sering beribadah," kata Benny" (<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/07/058478722/Dua-Mahasiswa-Papua-di-Yogya-Jadi-Tersangka>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2014).

Dari apa yang terlihat dalam pemberitaan di atas, dapat dijadikan sebagai contoh bahwa media sangat menyoroti hal-hal negatif yang beberapa oknum suku Papua lakukan di Yogyakarta. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap penilaian ataupun stereotip yang berkembang terhadap suku Papua.

C. Akulturasi Dalam Masyarakat

Suku Papua yang ada di Yogyakarta tentunya harus memiliki cara bersosialisasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat lokal. Hal ini sangat diperlukan jika mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka juga akan membutuhkan bantuan dari penduduk lokal. Tanpa adanya komunikasi yang baik, secara sederhana dikatakan mereka tidak akan memiliki teman dari masyarakat lokal, jika demikian, tentu saja akan sangat sulit untuk mendapatkan sebuah pertolongan dan bantuan dari masyarakat lokal.

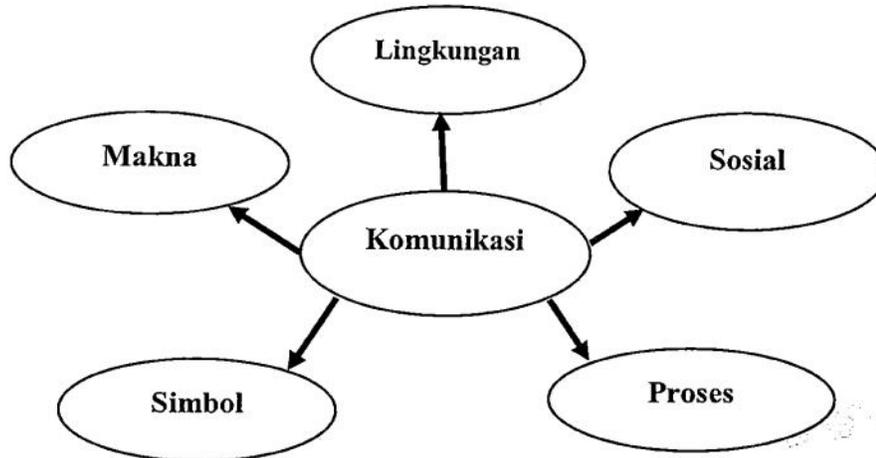
Berbicara tentang penduduk lokal dan penduduk pendatang, tentu kita akan secara otomatis terhubung dengan akulturasi, proses akulturasi tidak dapat terjadi dengan baik tanpa adanya proses sosial dan komunikasi yang baik. Akulturasi sendiri sebenarnya akan pasti terjadi pada masyarakat pendatang, mereka harus mencoba setidaknya sedikit bisa masuk kedalam lingkungan barunya tersebut, bahkan setiap penduduk pendatang wajarnya akan berupaya untuk mendapatkan proses akulturasi yang sempurna.

Sempurna atau tidaknya proses akulturasi tentu sangat berpengaruh dengan diterima secara sempurna dan tidak sempurna. Mungkin mereka diterima, tetapi seperti yang dikatakan sebelumnya “hanya” diterima seadanya, tanpa diterima secara sempurna oleh penduduk lokal (Mulyana dan Rakhmat,2006:139). Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara sendiri, melainkan manusia akan selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memperoleh bantuan orang lain, maka untuk hal itu diperlukan proses pembelajaran dalam sebuah pengalamannya. Dari seluruh aspek yang ada pada pembelajaran manusia, komunikasi menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah keakraban, dan mempermudah untuk memperoleh bantuan dari orang lain.

Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka tidak akan terjadi suatu hubungan yang baik. Lewat sebuah komunikasi kita menyesuaikan dan berhubungan dengan lingkungan kita, serta mendapatkan keanggotaan dan rasa memiliki dalam berbagai kelompok sosial yang ada di sekitar kita. Berbicara tentang komunikasi, mendefinisikan arti dari komunikasi merupakan sebuah hal yang menantang, seperti apa yang telah diungkapkan Katherin Milller (2005) dalam (West dan Turner, 2008:4), “terlalu banyak hal konseptualisasi mengenai komunikasi, dan konseptualisasi ini telah banyak mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini.

“Komunikasi merupakan proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka (west dan Turner, 2008 :5)”.

Gambar.2.2



(Sumber : West dan Turner, 2008 :5)

Dalam sebuah konteks yang luas, kita dapat merumuskan bahwa budaya merupakan sebagai panduan pola-pola yang merefleksikan respon komunikasi terhadap rangsangan lingkungan. Pola-pola budaya ini pada waktunya akan menggambarkan elemen-elemen yang sama dalam perilaku komunikasi individual ataupun kelompok dalam sebuah budaya. Sebuah kelompok ataupun individu dari budaya yang berbeda, harus menempatkan dirinya pada suatu kelompok budaya mayoritas yang ada, walaupun telah memiliki komunikasi antarbudaya yang baik, hal itu tidak akan menjadi sempurna jika tanpa diiringi proses akulturasi yang baik pula, seperti yang di ungkapkan Dedy Mulyana (dalam Mulyana dan Rakhmat, 2006:139) bahwa :

“Akulturasi adalah suatu proses penyesuaian diri yang dilakukan imigran untuk menyesuaikan dengan dan memperoleh budaya pribumi, yang akhirnya mengarah pada asimilasi. Asimilasi merupakan derajat tertinggi akulturasi yang secara teoritis terjadi. Bagi kebanyakan imigran, asimilasi mungkin merupakan tujuan sepanjang hidup.”

Le Vine (1973:17) menyatakan bahwa budaya dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang terorganisasi melalui cara-cara yang dilakukan individu dalam masyarakat dalam berkomunikasi antara satu sama lain dan cara mereka berfikir tentang diri mereka di lingkungan mereka. Sedangkan menurut Adler (1976:23) mengatakan bahwa proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu aturan (budaya) komunikasi dimulai pada masa awal kehidupan, yaitu melalui proses sosialisasi dan pendidikan, pola-pola budaya ditanamkan kedalam pikiran mereka dan menjadi sebuah kepribadian dan perilaku. Proses pembelajaran yang tersusun dengan baik ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan anggota budaya lainnya yang juga memiliki cara komunikasi yang tentunya berbeda, sehingga dapat terjalin komunikasi antarbudaya yang baik.

D. Penelitian Terdahulu

Mengetahui penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian merupakan hal penting dan akan memberikan banyak masukan untuk keperluan analisis dan proses berpikir peneliti. Selain itu juga menekankan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat memberikan masukan untuk penelitian ini baik dalam jenis, metode maupun isu yang serupa. Berikut adalah lima penelitian terdahulu yang berkaitan dengan riset peneliti :

Judul penelitian terdahulu yang pertama ini berjudul *Konflik Papua Dalam Konteks Hubungan Indonesia-Australia* ditulis oleh Sartika Manggabarani dari Universitas Hassanudin. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif Kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dari Sartika Manggabarani ini mengangkat

isu konflik Papua dalam konteks hubungan Indonesia - Australia. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kepentingan-kepentingan Australia di Papua, implikasi politis, keamanan, dan ekonomi konflik Papua bagi hubungan Indonesia – Australia.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, bentuk kepentingan-kepentingan Australia terhadap Papua berdasarkan nilai strategis geografis yaitu Papua yang berada di wilayah Utara Australia dapat menjadi *buffer zone* bagi wilayahnya. Sementara berdasarkan nilai strategis ekonomi, Papua memiliki sumber daya alam melimpah seperti logam dan minyak yang menjadi daya tarik Australia. Sementara itu, implikasi politis dari konflik Papua terhadap hubungan Indonesia Australia yaitu hubungan politik Indonesia – Australia sempat memanas ditahun 2006, sementara implikasi keamanan berupa terciptanya suatu perjanjian keamanan pada tahun 2006 yang disebut Lombok treaty dan tidak terjadi implikasi ekonomi yang signifikan dari konflik Papua bahkan dianggap membaik.

Judul penelitian terdahulu yang kedua ini yaitu *Pola Komunikasi Antarpribadi Mahasiswa Papua di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi*, ditulis oleh Nabella Rundengan, mahasiswi (S1) Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah mahasiswa Papua yang melanjutkan studinya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi. Sedangkan objek penelitian adalah pola komunikasi antarpribadi mereka dengan mahasiswa Manado. Informan penelitian dipilih secara *purposive*. Data dikumpulkan melalui

wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang telah dikumpul sepenuhnya dianalisis secara kualitatif dan analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lokasi penelitian secara berkesinambungan. Pengecekan keakuratan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Papua sulit untuk melakukan proses komunikasi secara tatap muka dengan mahasiswa Manado. Mereka sulit dalam menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan apa yang mereka maksudkan ketika berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, pola komunikasi yang didapat dari hasil penelitian ialah pola komunikasi primer. Yakni suatu proses penyampaian oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan simbol-simbol sebagai media atau saluran namun tidak berjalan dengan efektif karena mengalami beberapa hambatan yang mengakibatkan sulit terjalinnya proses komunikasi, atau tidak adanya *feedback* dari komunikan (mahasiswa Manado) ke komunikator (mahasiswa Papua).

Judul penelitian terdahulu yang ketiga ini adalah *Komunikasi Antarbudaya di Kalangan Mahasiswa (Studi Analisis Etnografi Tentang Identitas Etnis Mahasiswa Etnis Tionghoa dalam Kompetensi Komunikasi dengan Mahasiswa Pribumi di Kalangan Mahasiswa Fakultas Teknik Stambuk 2009 dan 2010 Universitas Sumatera Utara)* ditulis oleh Rifal Aswar Tanjung mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Sumatera Utara. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah studi analisis etnografi yaitu studi yang nantinya akan melukiskan secara

sistematis mengenai suatu kebudayaan kelompok yaitu perihal identitas etnis mahasiswa etnis Tionghoa yang di himpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama. Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif yang merupakan pengukuran dengan menggunakan data nominal yang menyangkut klasifikasi atau kategorisasi sejumlah variabel ke dalam beberapa sub kelas nominal. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan dapat diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa etnis Tionghoa yang ada di Fakultas Teknik stambuk 2009 dan 2010 Universitas Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas etnis dapat berperan sebagai pendorong dalam melakukan kompetensi komunikasi antara mahasiswa etnis Tionghoa dengan mahasiswa pribumi. Identitas etnis yang berbeda, tidak menjadikan penghambat dalam kompetensi komunikasi yang mereka lakukan. Jenis kelamin, agama, asal daerah, dan pekerjaan orang tua mampu membentuk identitas etnis pada mahasiswa etnis Tionghoa, sedangkan usia beserta departemen, stambuk, dan tingkatan semester bukanlah karakteristik yang dapat membentuk identitas etnis pada mereka. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa, informan perempuan lebih mampu dalam mengenali identitas etnis yang ada pada dirinya masing-masing lebih baik daripada informan laki-laki. Informan laki-laki juga mampu mengenali identitas etnisnya, tetapi hanya secara umumnya saja yang dimiliki oleh mayoritas etnis Tionghoa. Informan laki-laki tidak mampu mengenali identitas etnisnya secara pribadi. Meskipun ada perbedaan dalam

kemampuan mengenali identitas etnisnya, tetapi keduanya mampu melakukan kompetensi komunikasi yang baik dengan mahasiswa pribumi.

Judul penelitian terdahulu yang keempat berjudul *Slank dan Slankers di Kota Makasar (Sebuah Kajian Etnografi)*, ditulis oleh Heri Wahyudi, mahasiswa jurusan Antropologi Universitas Hasanuddin Makasar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh berasal dari lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara mendalam dengan informan yang tahu dan mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*Descriptive Research*), yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Strategi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah etnografi. Etnografi secara sempit dapat diartikan sebagai penggambaran tentang suatu etnis tertentu di ruang dan dalam masa tertentu, namun dalam pengertian yang lebih luas etnografi adalah studi tentang suatu kebudayaan atau komunitas sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SLANK telah memiliki banyak penggemar/fans sejak album pertama mereka diluncurkan pada tahun 1989 yang bernama "*Suit-Suit... He.He He (Gadis Sexy)*". Sejak saat itu para penggemarnya mulai berkembang diseluruh indonesia dan membuat club-club Slankers yang lebih terorganisir di beberapa daerah menjadikan Slankers termasuk kedalam salah satu fans klub terbesar di Indonesia. Salah satu klub yang ada di kota ini adalah Makassar Slankers Club (MSC). Mereka tertarik menjadi seorang Slankers

atau fans fanatik dari SLANK karena mereka mendapatkan banyak pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menilai bahwa apa yang diajarkan oleh SLANK dapat merubah kehidupan mereka kearah yang lebih positif atau lebih baik dan juga dapat merubah kehidupan bangsa ini menjadi lebih maju dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan PLUR.

Judul penelitian terdahulu yang terakhir yaitu *Pola Komunikasi Etnis Besemah (Studi Etnografi Komunikasi Pada Kelompok Etnis Di Dusun Jangkar, Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan)*, di tulis oleh Tina Kartika , Universitas Padjajaran. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma interpretif. Informan sebanyak delapan belas orang. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana pola komunikasi Etnis Besemah di Dusun Jangkar Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam. Waktu penelitian adalah lima belas bulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi Etnis Besemah di Dusun Jangkar dibangun dari peristiwa komunikatif, situasi komunikatif dan tindak komunikatif. Komponen komunikasi yang membentuk peristiwa komunikasi Etnis Besemah terdiri dari: Genre/tipe peristiwa komunikatif misalnya salam khas Etnis Besemah adalah samlekum. Dongeng misalnya Jambu Mbak Kulak, Gadis Perawan Di sarang Penyamun, Dirut. Bentuk Pesan yang digunakan adalah pesan verbal dan pesan nonverbal. Isi pesan yang digunakan tergantung situasi atau pesan apa yang dibutuhkan. Norma ketika berinteraksi misalnya menggunakan base tutughan dan singkuh. Kebiasaan antara lain: bercocok tanam, tradisi berhubungan dengan seseorang lahir/dapat untung, menikah/bekagoan,

meninggal, pria dewasa bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga, sedekah bersifat insidental seperti sedekah tolak balak. Interpretasi terhadap nilai, seperti: Singkuh, likuh, ziarah kubur, base tutughan, pepatah-petiti/ungkapan tradisional, bicara dengan suara keras, pekerjaan; buruh dan pengemis, lelaki dewasa sebagai kepala keluarga. Dari hasil hubungan komponen komunikasi tersebut didapatkan pola komunikasi, antara lain: 1). Pola komunikasi keluarga inti Etnis Besemah. 2). Pola komunikasi keluarga pasat Etnis Besemah, 3). Pola perilaku komunikasi singkuh Etnis Besemah, 4). Pola perilaku komunikasi melalui pepata jeme tue. 5). Pola pesan pada Etnis Besemah, 6). Pola komunikasi sesama Etnis Besemah.

E. Ulasan Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya kelima penelitian terdahulu yang telah dituliskan di atas memiliki perbedaan, ciri, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tentu semua penelitian terdahulu di atas memiliki jenis dan metode penelitian yang berbeda pula, kemudian juga memiliki berbagai macam isu yang diangkat. Hal ini sangat membantu untuk dijadikan referensi maupun sebagai pembelajaran. Isu-isu yang diambil dalam penelitian terdahulu diatas sangat menarik, tetapi masih dalam konsep penelitian yang sama dengan penelitian ini. Beberapa hal perbedaan nampak jelas dari berbagai penelitian terdahulu diatas, diantaranya dari jenis penelitian, metode penelitian, tetapi hal itu sangat menambah wawasan bagi penulis dalam penelitian ini.